

OPINI

SELASA, 25 AGUSTUS 2009

Wakil Rakyat Kita Telah Disumpah

ALHAMDULILLAH, gumam kawanku yang baru selesai dilantik sebagai anggota dewan kabupaten/kota (DPRD) periode 2009–2014. Seiring telah disumpahnya para anggota DPRD kabupaten/kota di Lampung, banyak cara mereka mengapresiasi kedudukan dan jabatannya yang baru itu. Ada yang melakukan sujud syukur di masjid, ada yang mengundang yasinan para tetangga, dan ada pula yang mengundang makan siang/malam dengan diawali pemotongan tumpeng oleh si empunya hajat.

Bahkan, di Kabupaten Tulang-bawang pakai arak-arakan menunggang gajah untuk mengekspresikan acara pisah-sambut bagi anggota lama dan baru. Pancaran bahagia di wajah mereka yang baru disumpah dan optimisme dalam setiap pidato-pidatonya mengundang banyak harapan bagi para pendengarnya. Sudah sepantasnya kita sebagai pemilih yang telah memberikan mandat kepada mereka pun ikut bergembira. Ucapan selamat bertaburan, lewat karangan bunga, spanduk, baliho, SMS, dan koran. Kegembiraan yang patut dipetik setelah perjalanan panjang melamar ke partai, mendaftar, melobi, negosiasi, bersaing, intrik, konflik, berkampanye, atau merangkak dari bawah sebagai kader partai.

Wakil kita itu kini telah disumpah atas keyakinan agama masing-masing untuk berprasetya (komitmen) kepada tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, mengawal dan mengamalkan amanat para pemilihnya. Sungguh sebuah proses yang sakral dengan pertanggungjawaban dunia dan akhirat.

Karena itulah, para pemilih optimistis mereka akan bekerja sungguh-sungguh mengemban amanat. Walaupun, pasti ada di antaranya yang sinis dan pesimis mengingat beberapa catatan minus pada periode-periode se-

belumnya. Misalnya, catatan minus pada fungsi legislasi DPRD belum menghasilkan produk-produk kebijakan yang sepenuhnya mengarah kepada peningkatan derajat keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan. Pada fungsi kontrol, dewan belum mampu mendorong terciptanya *clean and good government* secara konsekuen, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pemerintah daerah. Sedangkan pada fungsi *budgeting* (penganggaran), dewan belum mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tahapan proses siklus penganggaran daerah mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.

Tapi, ya sudahlah. Kita tutup lembaran lama dan kita buka lembaran baru. Pasti mereka yang baru disumpah itu telah punya catatan dan rencana sendiri atas dasar catatan kinerja para anggota DPRD yang lama. Pasti mereka bertekad untuk memperbaiki yang belum baik dan meningkatkan yang sudah baik.

Partai induk mereka pun pasti telah membekali mereka dengan berbagai pesan dari mulai asas perjuangan partai, platform/program partai, visi-misi, tujuan, dan strategi yang mesti dijalankan agar mereka mampu berperan

Oleh

HERTANTO

Pengajar FISIP Universitas Lampung

sebagai seorang senator atau legislator. Partai yang baik pasti akan mengingatkan bahwa mereka adalah wakil rakyat sesuai dengan nama institusi tempat mereka berkarya. Partai yang baik pasti tidak akan menuntut para anggotanya di DPRD untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya untuk kebesaran partai, apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan cara apa pun. Partai yang baik akan menekankan; jadilah wakil rakyat sejati demi kebesaran partai.

Mereka pun telah diberikan wawasan oleh partainya bahwa tugas mereka memiliki tiga tataran, yaitu legislasi, pengawasan (*control*), dan penganggaran (*budgeting*). Karena itu, mereka mesti paham produk hukum terkait dari level pusat sampai ke daerahnya. Dari UUD 1945 sampai ke peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terutama UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Legislasi

Untuk para wakil rakyat yang telah dilantik dan disumpah itu, saat ini dan ke depan perlu lebih memfokuskan pada fungsi legislasi terutama pada: 1) Mendorong pmda agar mengusulkan dan menghasilkan produk-produk kebijakan yang meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor pengembangan ekonomi kerakyatan, beasiswa pendidikan, dan subsidi kesehatan; 2) Membangun pemerintahan daerah yang bersih (*good governance*) dengan membentuk jaringan kaukus parlemen antikorupsi secara internal dan eksternal di kabupaten/kota di Lampung; 3) Peningkatan akses masyarakat

terhadap pelayanan apirasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dan produk hukum; 4) Membuat peraturan daerah yang tidak menakutkan dan menghambat investor datang ke daerah agar lapangan kerja bisa tumbuh di satu sisi serta pendapatan daerah pun meningkat dari pajak dan retribusi pada sisi yang lain; 5) Peningkatan pembinaan integrasi bangsa dan perlindungan HAM.

Pengawasan

Pada fungsi pengawasan para wakil rakyat perlu memprioritaskan pengawasan terhadap: 1) Kinerja layanan publik pmda semua tingkatan agar efektif, efisien, dan bebas KKN; 2) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat struktural yang tidak didasarkan pada profesionalisme; 3) Komitmen dan keberanian bertindak untuk membangun pendidikan yang lebih baik; 4) Pengawasan terhadap pengadaan barang yang tidak sesuai dengan harga dan kebutuhan di lapangan; 5) Pengawasan terhadap pengelolaan dana non-*budgeter* yang berupa subsidi dari pusat dan dana hibah atau dana *grand* yang berasal dari pinjaman/utang luar negeri serta beasiswa dari APBN maupun APBD; 6) Membangun kemitraan (*partnership*) dengan ormas dan LSM; dan 7) Kembangkan *check and balances* yang sehat dan demokratis antara DPRD dan pmda.

Penganggaran (Budgeting)

Pada fungsi penganggaran ini, para wakil rakyat perlu lebih memprioritaskan pada: 1) Penyusunan anggaran yang prorakyat miskin dan progender; 2) Komitmen penuh terhadap ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20%; 3) Membuka ruang transparansi dan partisipasi bagi masyarakat dalam setiap tahapan proses siklus penganggaran daerah dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Transparansi anggaran meru-

pakkan keterbukaan pemerintah daerah (pmda dan DPRD) dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran secara sistematis. Karena transparansi anggaran sebagai prasyarat partisipasi dan akuntabilitas anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan derajat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan perencanaan penganggaran. Akuntabilitas menekankan pada sejauhmana anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, ketepatan waktu proses perencanaan penganggaran dan tingkat penyimpangan anggaran.

Ketiga fungsi tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik bila anggota dewan tidak sering bolos, misalnya, jarang hadir dalam rapat komisi dan paripurna; atau tugas sebagai wakil rakyat hanya sekadar dijadikan sebagai kerja sambilan saja. Para anggota dewan harus menumbuhkan idealisasi kultur politik profesional. Jadikan prestasi kerja sebagai wakil rakyat merupakan kebanggaan dan *prestise* sebagai anggota DPRD yang terhormat. Bekerja sepenuh hati, sepenuh waktu (*full time*), hidup sederhana, produktif dalam menjalankan fungsi, dan malu melanggar etika, apalagi melanggar hukum. Tanpa semua itu, daerah ini akan semakin terpuruk.

Coba dengarkan pesan Iwan Fals kepada para wakil rakyat:

Wakil Rakyat seharusnya merakyat.

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

Wakil Rakyat bukan paduan suara

Hanya tahu nyanyian lagu "setuju!"

Wakil Rakyat seharusnya merakyat...

Selamat bertugas kepada para wakil rakyat, selamat mengemban amanat, dan selamat dunia akhirat. Semoga... (*)

(Artikel ini diterbitkan oleh Radar Lampung pada 25 Agustus 2009, hlm. 26)

Naskah Asli

WAKIL RAKYAT KITA TELAH DISUMPAH

HERTANTO

Pengajar FISIP Unila dan
Anggota Majelis Etik AJI Bandarlampung

Alhamdulillah, gumam kawanku yang baru selesai dilantik sebagai anggota dewan kabupaten dan kota (DPRD) periode 2009-2014. Seiring telah disumpahnya para anggota DPRD kota dan kabupaten di Lampung, banyak cara mereka mengapresiasi kedudukan dan jabatannya yang baru itu. Ada yang melakukan sujud syukur di masjid, ada yang mengundang yasinan para tetangga, dan ada pula yang mengundang makan siang/malam dengan diawali pemotongan tumpeng oleh si empunya hajat. Bahkan di Kabupaten Tulangbawang pakai arak-arakan menunggang gajah untuk mengekspresikan acarapisah-sambut bagi anggota lama dan baru. Pancaran bahagia di wajah mereka yang baru disumpah dan optimisme dalam setiap pidato-pidatonya mengundang banyak harapan bagi para pendengarnya. Sudah sepantasnya kita sebagai pemilih yang telah memberikan mandat kepada mereka pun ikut bergembira. Ucapan selamat bertaburan, lewat karangan bunga, spanduk, baliho, sms, dan koran. Kegembiraan yang patut dipetik setelah perjalanan panjang melamar ke partai, mendaftar, melobi, negosiasi, bersaing, intrik, konflik, berkampanye, atau merangkak dari bawah sebagai kader partai.

Wakil kita itu kini telah disumpah atas keyakinan agama masing-masing untuk berprasyerta (komitmen) kepada tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, mengawal dan mengamalkan amanat para pemilihnya. Sungguh, sebuah prosesi yang sakral dengan pertanggungjawaban dunia dan akherat.

Karena itulah, para pemilih optimis mereka akan bekerja sungguh-sungguh mengemban amanat. Walaupun pasti ada di antaranya yang sinis dan pesimistis mengingat beberapa catatan minus pada periode-periode sebelumnya. Misalnya, catatan minus pada fungsi legislasi DPRD adalah belum menghasilkan produk-produk kebijakan yang sepenuhnya mengarah kepada peningkatan derajat keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan. Pada fungsi kontrol, dewan belum mampu mendorong terciptanya *clean and good government* secara konsekuen, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pemerintah daerah. Sedangkan pada fungsi *budgeting* (penganggaran), dewan belum mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dalam tahapan proses siklus penganggaran daerah mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.

Tapi ya sudahlah, kita tutup lembaran lama dan kita buka lembaran baru. Pasti mereka yang baru disumpah itu telah punya catatan dan rencana sendiri atas dasar catatan kinerja para anggota DPRD yang lama. Pasti mereka bertekad untuk memperbaiki yang belum baik dan meningkatkan yang sudah baik.

Partai induk mereka pun pasti telah membekali mereka dengan berbagai pesan dari mulai asas perjuangan partai, platform/program partai, visi misi, tujuan, dan strategi yang mesti dijalankan agar mereka mampu berperan sebagai seorang senator atau legislator. Partai yang baik pasti akan mengingatkan bahwa mereka adalah wakil rakyat sesuai dengan nama institusi tempat mereka berkarya. Partai yang baik pasti tidak akan menuntut para anggotanya di DPRD untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya untuk kebesaran partai, apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan cara apapun. Partai yang baik akan menekankan: jadilah wakil rakyat sejati demi kebesaran partai.

Mereka pun telah diberikan wawasan oleh partainya bahwa tugas mereka memiliki 3 tataran, yaitu legislasi, pengawasan (control), dan penganggaran (budgeting). Karena itu, mereka mesti paham produk hukum terkait dari level pusat sampai ke daerahnya. Dari Undang-undang Dasar 1945 sampai ke peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terutama UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Legislasi

Untuk para wakil rakyat yang telah dilantik dan disumpah itu, saat ini dan ke depan perlu lebih memfokuskan pada fungsi legislasi terutama pada: 1) mendorong pemda agar mengusulkan dan menghasilkan produk-produk kebijakan yang meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor pengembangan ekonomi kerakyatan, beasiswa pendidikan, dan subsidi kesehatan; 2) membangun pemerintahan daerah yang bersih (*good governance*) dengan membentuk jaringan Kaukus Parlemen antikorupsi secara internal dan eksternal di kabupaten dan kota di Lampung; 3) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan apirasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dan produk hukum; 4) membuat peraturan daerah yang tidak menakutkan dan menghambat investor datang ke daerah, agar lapangan kerja bisa tumbuh di satu sisi, dan pendapatan daerah pun meningkat dari pajak dan retribusi pada sisi yang lain; 5) peningkatan pembinaan integrasi bangsa dan perlindungan HAM.

Pengawasan

Pada fungsi pengawasan para wakil rakyat perlu memprioritaskan pengawasan terhadap: 1) kinerja layanan publik pemda semua tingkatan agar efektif, efisien, dan bebas KKN; 2) pengawasan terhadap pengangkatan pejabat struktural yang tidak didasarkan pada profesionalisme; 3) komitmen dan keberanian bertindak untuk membangun pendidikan yang lebih baik; 4) pengawasan terhadap pengadaan barang yang tidak sesuai dengan harga dan kebutuhan di lapangan; 5) pengawasan terhadap pengelolaan dana non-budgeter yang berupa subsidi dari pusat, dan dana hibah atau dana grand yang berasal dari pinjaman/utang luar negeri, serta beasiswa dari APBN maupun APBD; 6) membangun kemitraan (*partnership*) dengan Ormas dan LSM; dan 7) kembangkan *check and balances* yang sehat dan demokratis antara DPRD dan pemda.

Penganggaran (Budgeting)

Pada fungsi penganggaran ini para wakil rakyat perlu lebih memprioritaskan pada: 1) penyusunan anggaran yang pro-rakyat miskin dan pro-gender; 2) komitmen penuh terhadap ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20%; 3) membuka ruang transparansi dan partisipasi bagi masyarakat dalam setiap tahapan proses siklus penganggaran daerah dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Transparansi anggaran merupakan keterbukaan pemerintah daerah (pemda dan DPRD) dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran secara sistematis. Karena transparansi anggaran sebagai prasyarat partisipasi dan akuntabilitas anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan derajat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan perencanaan penganggaran. Akuntabilitas menekankan pada sejauhmana anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, ketepatan waktu proses perencanaan penganggaran dan tingkat penyimpangan anggaran.

Ketiga fungsi tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik bila anggota dewan tidak sering bolos, misalnya, jarang hadir dalam rapat komisi dan paripurna; atau tugas sebagai wakil rakyat hanya sekedar dijadikan sebagai kerja sambilan saja. Para anggota dewan harus menumbuhkan idealisasi kultur politik profesional. Jadikan prestasi kerja sebagai wakil rakyat merupakan kebanggaan dan prestise sebagai anggota DPRD yang terhormat. Bekerja sepenuh hati, sepenuh waktu (full time), hidup sederhana, produktif dalam menjalankan fungsi, dan malu melanggar etika, apalagi melanggar hukum. Tanpa semua itu, daerah ini akan semakin terpuruk.

Coba dengarkan pesan Iwan Fals kepada para wakil rakyat:

*Wakil Rakyat seharusnya merakyat,
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil Rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju!"
Wakil Rakyat seharusnya merakyat...*

Selamat bertugas kepada para wakil rakyat, selamat mengemban amanat, dan selamat dunia akherat (semoga).

hertanto.1960.@fisip.unila.ac.id